



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310  
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Nomor : B-343/P.01/DL.03.02/02/2023 Jakarta, 20 Februari 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Seleksi Program Beasiswa  
S2 Dalam Negeri dan S2 Tematik *Smart City*  
Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;
  2. Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia;
  3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
- (Daftar terlampir)

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga/daerah, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2023. Program beasiswa yang ditawarkan meliputi program beasiswa S2 Dalam Negeri dan S2 Tematik *Smart City*.

Calon peserta Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 **diharuskan mendaftar melalui** situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>. **Pendaftaran melalui faksimile dan pos-el (email) tidak kami proses lebih lanjut.** Proses seleksi Program Beasiswa meliputi tahapan administrasi, tes potensi akademik (TPA), dan *test of english as a foreign language* (TOEFL). Persyaratan administrasi berupa dokumen pendukung dikirimkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman ke: **Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Pendidikan Gelombang 2 Tahun 2023), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, paling lambat tanggal 24 Maret 2023 (cap pos).**

Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2;

2. Hasil...

2. Hasil cetak formulir registrasi *online* yang telah diisi lengkap, bermeterai, bertanda tangan asli calon peserta dan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta stempel cap basah pada posisi tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD;
3. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
4. Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
5. Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi (formulir terlampir); serta
6. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan.

Apabila dalam kegiatan Seleksi Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Gelombang 2 Tahun 2023 terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik oleh pegawai Pusbindiklatren, Saudara dapat melaporkan tindakan tersebut ke surel **[pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id)** atau Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas dengan dilengkapi bukti otentik (identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya).

Panduan Pelaksanaan Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas

Tim Penyelenggaraan Pendidikan

Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320

Telepon: 021 31928280, 31928285

Pos-el: [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id)

Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. PPK Program PPN X, Kementerian PPN/Bappenas.



Lampiran 1 : Daftar Undangan  
Nomor : B-343/P.01/DL.03.02/02/2023  
Tanggal : 20 Februari 2023

---

## DAFTAR UNDANGAN

### I. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi (BKPM)
8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
14. Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI)
15. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
16. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
17. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
19. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
20. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
21. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
22. Badan Pusat Statistik (BPS)
23. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
24. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
25. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
26. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
29. Kejaksaan Agung
30. Kementerian Agama



31. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
32. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
33. Kementerian Dalam Negeri
34. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
37. Kementerian Kelautan dan Perikanan
38. Kementerian Kesehatan
39. Kementerian Ketenagakerjaan
40. Kementerian Komunikasi dan Informatika
41. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
42. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
43. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
44. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
45. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
46. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
47. Kementerian Luar Negeri
48. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
49. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
50. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
51. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
52. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
53. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek
54. Kementerian Perdagangan
55. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN atau Bappenas
56. Kementerian Perhubungan
57. Kementerian Perindustrian
58. Kementerian Pertahanan
59. Kementerian Pertanian
60. Kementerian Sekretariat Negara
61. Kementerian Sosial
62. Kepolisian Negara Republik Indonesia
63. Komisi Aparatur Sipil Negara
64. Komisi Pemberantasan Korupsi
65. Komisi Pemilihan Umum



66. Komisi Yudisial
67. Mahkamah Agung
68. Mahkamah Konstitusi
69. Ombudsman Republik Indonesia
68. Perpustakaan Nasional
69. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
70. Sekretariat Kabinet
71. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
72. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
73. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)

## **II. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:**

### **1. Provinsi Aceh**

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

### **2. Provinsi Sumatera Utara**

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan



- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhanbatu
- 2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunungsitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematangsiantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjungbalai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

### **3. Provinsi Sumatera Barat**

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh



- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

#### **4. Provinsi Riau**

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Singingi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

#### **5. Provinsi Kepulauan Riau**

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

#### **6. Provinsi Jambi**

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

#### **7. Provinsi Bengkulu**

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur
- 7.5. Kabupaten Bengkulu Kapahiang
- 7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
- 7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko

- 7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

## **8. Provinsi Sumatera Selatan**

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuklinggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Prabumulih

## **9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

## **10. Provinsi Lampung**

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro





## 11. Provinsi Banten

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

## 12. Provinsi Jawa Barat

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor
- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Kerawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

## 13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara



#### 14. Provinsi Jawa Tengah

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemasang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

#### 15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan



- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

#### **16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunung Kidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

#### **17. Provinsi Bali**

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar



## **18. Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

## **19. Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

## **20. Provinsi Kalimantan Barat**

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Pontianak
- 20.9. Kabupaten Sambas



- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

## **21. Provinsi Kalimantan Selatan**

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

## **22. Provinsi Kalimantan Tengah**

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangka Raya

## **23. Provinsi Kalimantan Timur**

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang



23.10. Kota Samarinda

**24. Provinsi Kalimantan Utara**

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

**25. Provinsi Gorontalo**

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

**26. Provinsi Sulawesi Selatan**

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

**27. Provinsi Sulawesi Tenggara**

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan



- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Baubau
- 27.17. Kota Kendari

## **28. Provinsi Sulawesi Tengah**

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Toli-Toli
- 28.13. Kota Palu

## **29. Provinsi Sulawesi Utara**

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon



**30. Provinsi Sulawesi Barat**

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Minahasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

**31. Provinsi Maluku**

- 31.1. Kabupaten Baru
- 31.2. Kabupaten Baru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

**32. Provinsi Maluku Utara**

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.6. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.7. Kabupaten Taliabu
- 32.8. Kota Ternate
- 32.9. Kota Tidore Kepulauan

**33. Provinsi Papua**

- 33.1. Kabupaten Biak Nunfor
- 33.2. Kabupaten Jayapura
- 33.3. Kabupaten Keerom
- 33.4. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.5. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.6. Kabupaten Sarmi
- 33.7. Kabupaten Supiori
- 33.8. Kabupaten Waropen
- 33.9. Kota Jayapura

**34. Provinsi Papua Barat**

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari



- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 34.5. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 34.6. Kabupaten Tambrauw
- 34.7. Kabupaten Teluk Bintuni
- 34.8. Kabupaten Teluk Wondama

### **35. Provinsi Papua Selatan**

- 35.1.1. Kabupaten Merauke
- 35.1.2. Kabupaten Boven Digoel
- 35.1.3. Kabupaten Mappi
- 35.1.4. Kabupaten Asmat

### **36. Provinsi Papua Tengah**

- 36.1.1. Kabupaten Nabire
- 36.1.2. Kabupaten Puncak Jaya
- 36.1.3. Kabupaten Paniai
- 36.1.4. Kabupaten Mimika
- 36.1.5. Kabupaten Puncak
- 36.1.6. Kabupaten Dogiyai
- 36.1.7. Kabupaten Intan Jaya
- 36.1.8. Kabupaten Deiyai

### **37. Provinsi Papua Pegunungan**

- 37.1.1. Kabupaten Jayawijaya
- 37.1.2. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 37.1.3. Kabupaten Yahukimo
- 37.1.4. Kabupaten Tolikara
- 37.1.5. Kabupaten Mamberamo Tengah
- 37.1.6. Kabupaten Yalimo
- 37.1.7. Kabupaten Lanny Jaya
- 37.1.8. Kabupaten Nduga

### **38. Provinsi Papua Barat Daya**

- 38.1.1. Kabupaten Maybrat
- 38.1.2. Kabupaten Tambrauw
- 38.1.3. Kabupaten Sorong Selatan
- 38.1.4. Kabupaten Sorong
- 38.1.5. Kabupaten Raja Ampat
- 38.1.6. Kota Sorong



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN  
PERENCANA  
**Wignyo Adiyoso**



## PROGRAM BEASISWA

### 2.1. Informasi Program Beasiswa Tahun 2023

Dalam pelaksanaan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2023, kami menawarkan program beasiswa untuk:

- Program S2 Dalam Negeri di 25 (dua puluh lima) program studi pada 11 (sebelas) universitas dalam negeri, yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren untuk jangka waktu perkuliahan selama kurang lebih 18 bulan;
- Program beasiswa S2 Tematik *Smart City* merupakan program yang diselenggarakan dalam rangka mendukung gerakan membangun *Smart City* yang dikembangkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Program S2 Tematik *Smart City* dilaksanakan untuk memfasilitasi penyusunan Masterplan *Smart City* agar dapat lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Sebagai informasi tambahan, program S2 Tematik *Smart City* dirancang dengan durasi studi maksimum 24 bulan dengan memasukkan kegiatan magang pada institusi yang menyelenggarakan program *smart city*.

### 2.2. Persyaratan Program Beasiswa

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, dengan ini kami informasikan bahwa untuk Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2023 akan mengacu kepada persyaratan yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenpan RB tersebut dan atau disesuaikan dengan persyaratan dari masing-masing instansi untuk penetapan tugas belajar, yakni:

PERSYARATAN	S2 DN/TEMATIK
<b>SYARAT ADMINISTRATIF</b>	
Pengusulan Dari Instansi	Eselon II bidangKepegawaian
Unit Kerja	Unit Kerja Perencanaan
PNS 100% Minimal Gol IIIA	1 Tahun
Strata Pendidikan Min.	D4/S1*
Minimal Tahun Lulus S1/S2	2 Tahun
Umur Maksimal*	37 Tahun**
IPK Minimal	2.75
Surat Keterangan Rencana PengembanganSDM	Eselon II bidangKepegawaian
<b>SELEKSI NASIONAL</b>	
Tes Potensi Akademik	
Pusat	565
Pusat Luar Jawa	525
Pemda Jawa	525
Pemda Luar Jawa	500
TOEFL Minimal	450
IBT TOEFL setelah EAP	
Wawancara Tertulis	MenunjukkanKomitmen

Keterangan :

\*Hanya pada beberapa program studi menerima peserta dengan latar belakang pendidikan D4.

\*\* Batas maksimal usia pendaftar ialah 37 tahun 0 bulan per 1 Agustus 2023

Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa beberapa program studi memiliki perbedaan persyaratan tersendiri diluar dari persyaratan Pusbindiklatren Bappenas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk program S2 Dalam Negeri di lingkup Institut Teknologi Bandung, minimal nilai *Institutional* TOEFL ialah 475;
- b. Untuk program S2 Dalam Negeri di lingkup Universitas Indonesia, minimal nilai *Institutional* TOEFL ialah 500.

Bagi peserta dengan latar belakang pendidikan D4, berikut kami sampaikan ketentuan di masing-masing program studi (Informasi lebih lanjut bisa menghubungi CP dari masing-masing program studi yang terdapat dalam lampiran) :

**a. Menerima Calon Karyasiswa Iulusan D4**

- Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya;

**b. Tidak Menerima Calon Karyasiswa D4**

- Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung;
- Magister Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;
- Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin;

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021, kami informasikan juga bahwa untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar (daftar daerah terlampir), usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:

Program Strata II (S-2) atau setara (baik S2 Dalam Negeri maupun S2 *Linkage*), berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun\*;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, berikut ini daftar daerah tertinggal yang berjumlah 62 Kabupaten.

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	Sumatera Utara	Nias Barat	-
2	Sumatera Utara	Nias Utara	-
3	Sumatera Utara	Nias	-
4	Sumatera Utara	Nias Selatan	-
5	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
6	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	DOB
7	Lampung	Pesisir Barat	DOB
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	-
9	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	-
10	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	-
11	Nusa Tenggara Timur	Kupang	-
12	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	-
13	Nusa Tenggara Timur	Belu	-
14	Nusa Tenggara Timur	Alor	-
15	Nusa Tenggara Timur	Lembata	-
16	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	-
17	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	-
18	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	-
19	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	-
20	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	-
21	Nusa Tenggara Timur	Malaka	DOB
22	Sulawesi Tengah	Donggala	-
23	Sulawesi Tengah	Tojo Una Una	-
24	Sulawesi Tengah	Sigi	-
25	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	-
26	Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	-
27	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	-
28	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	-
29	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	-
30	Maluku	Kab. Buru Selatan	-
31	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	-
32	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	DOB

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
33	Papua	Keerom	-
34	Papua	Pegunungan Bintang	-
35	Papua	Memberamo Tengah	-
36	Papua	Supiori	-
37	Papua	Waropen	-
38	Papua	Memberamo Raya	-
39	Papua	Asmat	-
40	Papua	Mappi	-
41	Papua	Boven Digoel	-
42	Papua	Nabire	-
43	Papua	Intan Jaya	-
44	Papua	Deiyai	-
45	Papua	Dogiyai	-
46	Papua	Paniai	-
47	Papua	Jayawijaya	-
48	Papua	Lanny Jaya	-
49	Papua	Yalimo	-
50	Papua	Yahukimo	-
51	Papua	Tolikara	-
52	Papua	Puncak	-
53	Papua	Puncak Jaya	-
54	Papua	Nduga	-
55	Papua Barat	Sorong	-
56	Papua Barat	Sorong Selatan	-
57	Papua Barat	Maybrat	-
58	Papua Barat	Tambrau	-
59	Papua Barat	Manokwari Selatan	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
60	Papua Barat	Pegunungan Arfak	
61	Papua Barat	Teluk Bintuni	-
62	Papua Barat	Teluk Wondama	-

\*Hanya berlaku untuk ASN yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten di atas.

### 2.3. Jadwal Pelaksanaan Program Beasiswa

Jadwal Seleksi Program Beasiswa Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Surat Penawaran Beasiswa Pusbindiklatren 2023	Februari 2023
2	<i>Deadline Registrasi Online</i>	24 Maret 2023
3	<i>Deadline Cap Pos Pengiriman Berkas Peserta</i>	24 Maret 2023
4	Pemanggilan Peserta Seleksi Nasional TPA & TOEFL 2023	April 2023
5	Seleksi Nasional TPA 2023	6 Mei 2023
6	Seleksi Nasional TOEFL 2023	13 Mei 2023
7	Pengumuman Program S2 Dalam Negeri dan Tematik	22 Mei 2023

\*Keterangan : Jika terjadi perubahan jadwal, akan diinformasikan di kemudian hari.

### 2.4. Pilihan Program Studi (Detail Informasi dan Persyaratan masing-masing program studi dapat dilihat dalam lampiran)

Program S2 Dalam Negeri:

1. Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;
2. Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung;
3. Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya;
4. Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Peminatan Manajemen Perencanaan, Universitas Hasanuddin;

Program S2 Tematik Smart City



**Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

1. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada (Tematik *Smart City*)
2. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro (Tematik *Smart City*)
3. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung (Tematik *Smart City*)

## 2.5. Prosedur Pelamaran

1. Pelamar yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2;
2. Peserta yang telah memenuhi persyaratan di atas, diharuskan mengisi formulir pendaftaran **secara online** dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung. Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi serta program beasiswa yang diminati;
3. Peserta yang diprioritaskan adalah: a) Fungsional Perencana; b) Perencana di Instansi Perencanaan dan/atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Perencanaan; dan c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan;
4. Pusbindiklatren telah mengirimkan berkas penawaran beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 ke seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Kementerian/Lembaga melalui bagian kepegawaian di masing-masing instansi. Selain itu, kami juga mengunggah berkas penawaran beasiswa Pusbindiklatren pada situs Pusbindiklatren Bappenas di <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>;
5. **Jika peserta mengalami kesulitan** dalam proses registrasi *online*, peserta diperkenankan menggunakan formulir manual yang terdapat dalam lampiran;
6. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang **bermaterai, bertandatangan asli dan stempel cap basah** dengan persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung;
7. Formulir pendaftaran harus disertai/dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
  - a) Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2;
  - b) Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
  - c) Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi
  - d) Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi;
  - e) Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan;



- f) Khusus bagi para Pejabat Fungsional Perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisasi; serta
- g) Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai), sebagaimana format terlampir.

## 2.6. Komponen Biaya

Informasi terkait dengan biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas serta biaya yang ditanggung oleh instansi asal, mengacu kepada Buku Panduan Karyawan Tahun 2022 serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Bersama (*Cost Sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut:

Program S2 Dalam Negeri

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Biaya Pendidikan ( <i>Tuition Fee</i> )	Program	<i>At Cost Max</i>
2	Tunjangan Hidup (sesuai Zonasi)	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3	Publikasi Ilmiah/Seminar	Program	<i>At Cost Max</i>
4	Tunjangan Penelitian/Tesis	Program	<i>Lump Sum</i>

Zonasi Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023





NO	KOTA	TUNJANGAN BIAYA HIDUP	TUNJANGAN BUKU	TOTAL TUNJANGAN BIAYA HIDUP	ZONASI
1	Padang	Rp.1.900.000	Rp.200.000	Rp.2.100.000	Zona 1
2	Aceh				
3	Palembang				
4	Yogyakarta				
5	Bandung	Rp.2.300.000	Rp.200.000	Rp.2.500.000	Zona 2
6	Makassar				
7	Malang				
8	Bogor				
9	Semarang				
10	Denpasar				
11	Surabaya	Rp.3.200.000	Rp.200.000	Rp.3.400.000	Zona 3
12	DKI Jakarta				
13	Depok				

## 2.7. Sanksi

1. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program studi secara sepihak, maka berdasarkan Surat Perjanjian, peserta **harus** mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa kepada kas negara, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021;
2. Peserta akan **dikenakan sanksi** jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti pendidikan, Pusbindiklatren menemukan data yang tidak sesuai dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren (formulir pendaftaran) maupun dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren;
3. Sanksi yang dimaksud pada *point* di atas dapat berupa:
  - a) Pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan;
  - b) Pembatalan pemberian beasiswa dan penggantian biaya seleksi jika diketahui dalam proses penempatan;
  - c) Pertimbangan kembali terhadap instansi dan/atau unit kerja terkait dalam proses penempatan karyawan di kemudian hari.

## 2.8. Format Pernyataan Rencana Studi



**Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

Paragraf 1 : Latar Belakang Pendidikan sebelumnya, S1 untuk yang bermaksud mengambil program S2;





Paragraf 2 : Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;

Paragraf 3 : Alasan memilih bidang studi yang diinginkan serta dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;







Paragraf 4 : Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia

## 2.9. Panduan Registrasi *Online*

**Pendaftaran bagi peserta baru dan belum pernah sama sekali mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:**

1. Silakan masuk ke Menu DAFTAR: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>
2. Masukkan NIP Anda lalu  klik CEK
3. Apabila Anda belum terdaftar, lalu isikan: *User Name*, Nama Lengkap, Email, *Password*, *Re-Password* lalu  klik DAFTAR.
4. Kemudian silahkan Anda cek di email untuk melihat notifikasi pemberitahuan aktivasi akun Anda.
5. Lalu  klik link aktivasi, nanti akan diarahkan ke halaman lain.
6. Bila ada pertanyaan atau *Alert*  klik OK
7. Kemudian *Login* dengan memasukkan NIP dan *Password* yang sebelumnya sudah dibuat.

**Pendaftaran bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:**

1. Untuk mendapatkan *username* dan *password* masuk ke Menu **Lupa Password**: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar/forgot.php>;
2. Masukkan *email* yang sebelumnya pernah didaftarkan, jika nanti *email* Anda belum terdaftar di data Diklat Pusbindiklatren Bappenas, silakan Anda mengirim *email* ke Pusbindiklatren Bappenas dengan *email address*: [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id) Perihal *up date email* Anda;
3. Lalu  klik KIRIM;
4. Kemudian lihat *email* dan  klik *link Forgot Password*;
5. Jika terdapat peringatan/*Alert*  klik OK;
6. Silakan  klik DIKLAT GELAR/DIKLAT NON GELAR;
7. Lalu isikan formulir yang sudah tersedia;
8. Setelah formulir diisikan semua lalu  klik DAFTAR/UBAH;
9. Untuk mendapatkan formulir yang sudah diisikan  klik UNDUH;



INFORMASI DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

NO	PROGRAM STUDI	INFORMASI UMUM	PERSYARATAN MASUK	PERSYARATAN LULUS
1	Magister Ilmu Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor	<p><b>Ketua Program Studi :</b> Dr. Dra. Khursatul Munibah M.Sc.</p> <p><b>Pengelola Akademik :</b> Yuli Pertiwi, A.Md</p> <p><b>Link Informasi :</b> <a href="http://soil.ipb.ac.id/">http://soil.ipb.ac.id/</a></p> <p><b>Alamat :</b> Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680</p> <p><b>Email :</b> s2pwl@apps.ipb.ac.id / pspwl_ipb@yahoo.com</p> <p><b>Nomor Kontak :</b> 0251-8629360</p> <p><b>Jumlah SKS :</b> 40 sks + 3 sks (bahasa Inggris)</p>	<p><b>Latar Belakang Pendidikan :</b> S1</p> <p><b>Syarat Linearitas :</b> Linearitas dengan bidang ilmu S1, bidang kerja dan kegiatan ilmiah</p> <p><b>TPA Minimal :</b> Bagi pelamar penyelenggaraan khusus program magister dengan IPK 2,00 – 2,49 (0 – 4) atau yang setara dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima dengan status percobaan apabila memiliki TPA <math>\geq</math> 475.</p> <p><b>TOEFL Minimal :</b> Tidak ada prasyarat nilai TOEFL minimal. Pada saat masuk IPB, akan ada placement test bahasa Inggris. Jika nilai TOEFL &gt; 500, maka lolos <i>placement test</i> dengan nilai bahasa Inggris A.</p> <p><b>IPK Minimal :</b> IPK &gt; 2,75 akan mendapatkan status penerimaan biasa namun jika IPK &lt; 2,75 dan TPA 475, maka status penerimaan percobaan sehingga konsekuensinya ialah IPK Semester 1 &gt; 3,0</p> <p><b>Persyaratan Lainnya :</b> Akreditasi Program Studi S1 Minimal B</p>	<p><b>TPA Minimal :</b></p> <p><b>TOEFL Minimal :</b></p> <p><b>IPK Minimal :</b> 3,00 (0,00- 4,00)</p> <p><b>Publikasi Ilmiah :</b> Status Accepted dengan nilai minimal B. Namun status submit dapat dijadikan syarat untuk ujian tesis.</p> <p>Jurnal SINTA 1 hingga 6, <i>proceeding</i> seminar internasional (<i>oral presentation</i>) serta jurnal ilmiah internasional</p> <p><b>Syarat Yudisium :</b> Mahasiswa program magister dinyatakan lulus dengan predikat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Memuaskan apabila memenuhi kewajiban publikasi dan mencapai IPK 3,00-3,50;</li> <li>(2) Sangat memuaskan apabila memenuhi kewajiban publikasi dan mencapai IPK 3,51-3,75;</li> <li>(3) Dengan Pujian (<i>cum laude</i>) apabila mencapai IPK &gt;3,75, dengan nilai minimal B, masa studi paling lama 2,5 tahun dan memiliki satu artikel sebagai penulis pertama pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2, atau jurnal internasional terindeks scopus, atau prosiding seminar internasional terindeks scopus, dengan status minimal telah diterima untuk diterbitkan.</li> </ol>

				<p><b>Persyaratan Lainnya :</b> Untuk program magister jumlah minimal sks yang harus dikumpulkan adalah 40 sks di luar mata kuliah Bahasa Inggris.</p>
2	Magister Transportasi Institut Teknologi Bandung	<p><b>Ketua Program Studi :</b> Adiwana Fahlan Aritenang, ST., MGIT., Ph.D  <b>Pengelola Akademik :</b> Wati Sukiwati  <b>Link Informasi :</b>  <b>Alamat :</b> Jl. Ganesha No 10 Bandung  <b>Email :</b> pl@itb.ac.id  <b>Nomor Kontak :</b>                      022-2509171; 2504735  <b>Jumlah SKS :</b> 36</p>	<p><b>Latar Belakang Pendidikan :</b> D4 atau S1  <b>Syarat Linearitas :</b> TPA Minimal : 475  <b>TOEFL Minimal :</b> 475 <b>IPK Minimal :</b> 2.75  <b>Persyaratan Lainnya :</b></p>	<p><b>TPA Minimal :</b> 500 <b>TOEFL Minimal :</b> 475  <b>IPK Minimal :</b> 3.25  <b>Publikasi Ilmiah :</b> Telah memenuhi persyaratan publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam:                      1) jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurangnya dalam proses review (under review), <u>atau</u>                      2) telah terdaftar sebagai penyaji seminar ilmiah nasional atau internasional  <b>Syarat Yudisium :</b>                      1. Cum Laude – Lulus Tepat Waktu dengan IPK minimal 3,75                      2. Sangat Memuaskan – Lulus tidak lebih dari 1 semester dari Batasan masa studi dengan IPK minimal 3,5                      3. Memuaskan – Memenuhi semua persyaratan lulus program Magister dalam program studi  <b>Persyaratan Lainnya :</b></p>

NO	PROGRAM STUDI	INFORMASI UMUM	PERSYARATAN MASUK	PERSYARATAN LULUS
3	Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya	<p><b>Ketua Program Studi :</b> Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE, ME</p> <p><b>Pengelola Akademik :</b> Abdul Ghofar, SE., M.Si., M.Acc., DBA., Ak., CA</p> <p><b>Link Informasi :</b> <a href="https://ie.feb.ub.ac.id/magister/">https://ie.feb.ub.ac.id/magister/</a></p> <p><b>Alamat :</b> Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145</p> <p><b>Email :</b> ie.feb@ub.ac.id</p> <p><b>Nomor Kontak :</b> 082143432234</p> <p><b>Jumlah SKS :</b> 42</p>	<p><b>Latar Belakang Pendidikan :</b> S1</p> <p><b>Syarat Linearitas :</b> Matrikulasi bagi nonIlmu ekonomi</p> <p><b>TPA Minimal :</b> 480 TOEFL</p> <p><b>Minimal :</b> 500</p> <p><b>IPK Minimal :</b> 3</p> <p><b>Persyaratan Lainnya :</b> Program Studiasal telah terakreditasi BAN PT</p>	<p><b>TPA Minimal :</b> 480 TOEFL</p> <p><b>Minimal :</b> 500</p> <p><b>IPK Minimal :</b> 3.00</p> <p><b>Publikasi Ilmiah :</b> Mewajibkan kebijakan tersebut sampai karya ilmiahnya diterbitkan (published).</p> <p><b>Syarat Yudisium :</b> 1. Menyelesaikan perkuliahan, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK &gt; 3,0 selama masa studinya. 2. Nilai minimal seluruh matakuliah adalah B.</p> <p><b>Persyaratan Lainnya :</b> Menghasilkan publikasi yang telah diterima dalam bentuk Jurnal ilmiah yang terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter), jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2, atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor; atau proceeding terindeks Scopus</p>

NO	PROGRAM STUDI	INFORMASI UMUM	PERSYARATAN MASUK	PERSYARATAN LULUS
4	Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanudin	<p><b>Ketua Program Studi :</b> Prof.Dr.Ir. Ahmad Munir,M.Eng</p> <p><b>Pengelola Akademik :</b> Umy Rahmi Idrus, ST.,M.Si</p> <p><b>Link Informasi :</b> <a href="https://bit.ly/PPW-Unhas">https://bit.ly/PPW-Unhas</a></p> <p><b>Alamat :</b> Perintis Kemerdekaan Tamalanrea KM.10 Makassar 90245</p> <p><b>Email :</b> info@pasca.unhas.ac.id</p> <p><b>Nomor Kontak :</b> 081342209700</p> <p><b>Jumlah SKS :</b> 42</p>	<p><b>Latar Belakang Pendidikan :</b> S1</p> <p><b>Syarat Linearitas :</b></p> <p><b>TPA Minimal :</b> 500</p> <p><b>TOEFL Minimal :</b> 450</p> <p><b>IPK Minimal :</b> 3.00</p> <p><b>Persyaratan Lainnya :</b></p>	<p><b>TPA Minimal :</b> 500</p> <p><b>TOEFL Minimal :</b> 450</p> <p><b>IPK Minimal :</b> 3.00</p> <p><b>Publikasi Ilmiah :</b> Mewajibkan kebijakan tersebut sampai karya ilmiah diterima oleh pihak redaksi (accepted).</p> <p><b>Syarat Yudisium :</b> Telah menyelesaikan seluruh kegiatan akademik (Ujian Akhir Magister)</p> <p><b>Persyaratan Lainnya :</b></p>

(Informasi Lebih Lanjut dapat menghubungi CP dari masing-masing program studi)

**HANYA DIGUNAKAN  
JIKA KESULITAN  
REGISTRASI ONLINE**

**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS  
FORMULIR CALON PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA  
(ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR.  
HARUS DIISI DENGAN HURUF BALOK)**

- 
1. Nama Lengkap (Sesuai Ijazah Terakhir) : .....
2. NIP : .....
3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- Jenis Kelamin : L/P
4. Alamat Rumah : .....
- Kode Pos : .....
- Kota/Kabupaten : .....
- Provinsi : .....
- Telepon/Handphone : .....
5. Email Address : .....
6. Instansi (Pemkot/Pemkab/Pemprov/KL) : .....
7. Unit Kerja Eselon II/III : .....
8. Alamat Kantor : .....
- Kode Pos : .....
- Kota/Kabupaten : .....
- Provinsi : .....
- Telepon/Handphone : .....
- Email Instansi : .....
9. Jabatan : .....
- Golongan : .....
10. Unit/Bagian Tempat Bekerja : .....
- Apakah Unit Kerja Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
- Apakah Pekerjaan Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
11. Uraikan Secara Singkat Pekerjaan Saudara :  
.....  
.....  
.....  
.....
- TMT PNS 100 % Golongan III/A pada S1 : .....
- Masa Kerja sejak 100 % Golongan III/A : .....
12. Pendidikan Terakhir : DIV/S1/S2

Perguruan Tinggi : .....  
Fakultas (DIV/S1/S2) : .....  
Jurusan : .....  
Lulus Tahun (DIV/S1/S2) : .....  
IPK : ..... dari .....

13. Selain beasiswa Pusbindiklatren, apakah sedang mengikuti beasiswa di instansi lainnya? Ya/Tidak

14. Pilihan Rencana Studi S2 :

Tuliskan Urutan Prioritas Pilihan di dalam kurung yang tersedia :

(..... ) Program S2 Dalam Negeri

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

(..... ) Program S2 Tematik *Smart City*

1. ....
2. ....
3. ....

15. Tuliskan rencana studi pada program S2 prioritas pertama Saudara ke dalam esai maksimal 500 kata, yang terdiri dari (a) Latar belakang bidang studi Saudara; (b) Pengalaman kerja yang menerangkan tentang tugas pokok dan fungsi Saudara serta yang anda lakukan di instansi Saudara; (c) Alasan memilih program gelar prioritas pertama Saudara, serta; (d) Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia. Silakan menggunakan kertas tambahan jika diperlukan.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

Menyetujui,

(Kepala BKD/Kepala Biro SDM)  
(TTD dan Cap Basah)

(.....)

....., ..... 2023

Yang Bersangkutan,

(Materai 10000 Rupiah)

(.....)

Catatan : Formulir dapat digandakan, dan yang diproses hanya yang bertanda tangan dan bermeterai asli. Harap melampirkan Surat Usulan, FC ijazah dan transkrip, serta SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

- 6 -  
KOP SURAT  
BKD/BIRO KEPEGAWAIAN/BIRO SDM  
**SURAT PERNYATAAN PENGEMBANGAN SDM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : .....

Dengan ini merangkan bahwa, pegawai atas nama:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : .....

Adalah ASN pada instansi tersebut di atas dan yang bersangkutan memilih program studi beasiswa Pusbindiklatren dengan urutan pilihan program studi sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Pilihan-pilihan program studi tersebut sudah sesuai dengan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi peserta tersebut, sehingga diharapkan keikutsertaan pegawai tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan serta peningkatan kinerja instansi/institusi pegawai tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2023  
**Kepala BKD/Kepala Biro SDM,**

(.....)

**(Materai 10.000, TTD dan Cap Basah)**

Tembusan:  
Atasan langsung yang bersangkutan.